

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus, 2011, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, BIP Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung.
- Bakhri, Syaiful, 2009, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta
- Effendy, Marwan, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dalam Perpektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Eidie, Asbjorn, Alfredsson Gudmundur dkk, 1992, *The Universal Declaration of Human Rights: A Commentary*, Scandinavian University Press, Oslo.
- Harahap, M. Yahya, 2013, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 2013, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1991, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Indrayana, Denny, 2016, *Jangan Bunuh KPK Komisi Pemberantasan Korupsi*, Intrans Publishing, Malang.
- Hiariej, Eddy O.S. 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Kelompok Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Indrayana, Denny, 2016, *Jangan Bunuh KPK Komisi Pemberantasan Korupsi*, Intrans Publishing, Malang.
- Ismail, Nurhasan, 2000, *Sosiologi Korupsi*, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, Jakarta.

Iver, Mac, 1988, *Negara Modern*, Bina Aksara, Jakarta.

Jerome Hall, 1958, *General Principles Of Criminal Law, Second Edition, The Bobbs-Merrill. Inc. A Subsidiary Of Howard W. Smas & Co., Inc. Publishers. Indianapolis*, New York.

Kanter , EY & SR Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.

Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana-Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.

Locke, John, 1963, *Two Treatises of Government*, Cambridge University Press, New York.

Manthovani, Reda, 2013, *Penyadapan vs. Privasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

Nowak, Manfred, 2003, *Pengantar pada Rezim HAM Internasional*, Martinus Nijhoff, Wina, hlm. 1-2.

Nurdjana, IGM, 2003, *Korupsi dalam Prektek Bisnis*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Pradjonggo, Tjandra Sridjaya, 2007, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Surabaya.

Rahardiansah, Trubus, 2010, *Pengantar Ilmu Politik: Paradigma, Konsep Dasar dan Relevansinya untuk Ilmu Hukum*, Universitas Trisakti, Jakarta.

Raharjo, Agus, 2002, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rahmani, 2007, *Pengantar Hukum Telematika*, Diktat Hukum Telematika, Jakarta.

Riswandi, Budi Agus, 2003, *Hukum dan Internet di Indonesia*, UII Pres, Yogyakarta.

Rousseau, Jean Jacques, 2010, *Kontrak Sosial*, Dian Rakyat, Jakarta.

Shapiro, Ian, 2006, *Evolusi Hak dalam Teori Liberal*, Freedom Institute & Yayasan Obor Indonesia.

- Soemodihardjo, R. Dyatmiko, 2008, *Mencegah dan Memberantas Korupsi Mencermati Dinamikanya di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung.
- Surachmin dan Suhadi Cahaya, 2011, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tauda, Gunawan A, 2012, *Komisi Negara Independen Eksistensi Independent Agencies sebagai Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan*, Genta Press, Yogyakarta.
- Widodo, 2013, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law)*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

B. Artikel Jurnal

- Kholiq, M. Abdul, "Eksistensi dalam Peradilan Korupsi di Indonesia", *Jurnal Hukum*, No. 26 Vol 11 Mei 2004.

C. Artikel Majalah atau Koran

- Iilham Fadlan Putuhena, "Politik Hukum Penyadapan (Telaah atas Tata Cara Pengaturan dalam Undang-Undang)", *Majalah Hukum Nasional*, 2015.

D. INTERNET

- Asep Riawan, "Video Debat Seru, sudah efektifkah penyadapan KPK? Metro TV", <https://m.youtube.com/watch?v=Y34hm0XAR98>, diakses 20 Maret 2017.
- Bibit Samad Rinto, "Video Debat Seru, Sudah Efektifkah Penyadapan KPK? Metro TV", <https://m.youtube.com/watch?v=Y34hm0XAR98>, diakses 20 Maret 2017.
- Elman Saragih, "Jokowi, Pertahankan Taring Penyadapan KPK", <https://m.youtube.com/watch?v=tEIJFoRd158>, diakses 20 Maret 2017.

Emerson Yuntho, “Video Debat Seru, Sudah Efektifkah Penyadapan KPK? Metro TV”,
<https://m.youtube.com/watch?v=Y34hm0XAR98>, diakses 20
Maret 2017.

Indriyanto Seno Adji, “KPK: Penyadapan Jadi Alat Bukti Utama
Ungkap Kasus Korupsi”,
<http://nasional.kompas.com/read/2015/06/18/08501971/KPK.Penyadapan.Jadi.Alat.Bukti.Utama.Ungkap.Kasus.Korupsi>,
diakses 1 April 2017.

Masington, “Video Debat Seru, Sudah Efektifkah Penyadapan KPK?
Metro TV”, <https://m.youtube.com/watch?v=Y34hm0XAR98>,
diakses 20 Maret 2017.

Novel Baswedan, “KPK Menolak Jika Penyadapan Harus Izin
Pengadilan”, <https://m.youtube.com/watch?v=EjEHhiryQJ0>, 20
Maret 2017.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4250).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International
Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional
tentang Hak-hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4558)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062)

Peraturan Menteri Informasi dan Telekomunikasi Nomor 11/PERM.KOMINFO/02/2006 Tentang Teknis Intersepsi terhadap Informasi.

F. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-1/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 29 Maret 2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2 Februari 2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 22 Juni 2016.